

IMPLEMENTASI KEBIJAKAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN PARTAI POLITIK OLEH DEWAN PIMPINAN CABANG PDI PERJUANGAN KOTA DEPOK TAHUN 2021-2023

Thephilus Lukas Ayomi

Universitas Prof. DR. Moestopo (Beragama)

Email Korespondensi: thephiluslukas@gmail.com

ABSTRACT

This study aims to analyze and describe the Standards and objectives, Supporting resources, Communication and strengthening activities between organizations, Characteristics of implementing positions in management, Political and social economic conditions, and Disposition of implementers in managing political party financial assistance by the Depok City Branch Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle. This study uses a descriptive method with a qualitative approach, with data collection techniques through observation and interviews. Data analysis techniques are carried out through data collection, data presentation and drawing conclusions. Based on the results of the study and discussion above, overall it can be concluded that the implementation of the policy on the use of political party financial assistance by the Depok City Branch Leadership Council of the Indonesian Democratic Party of Struggle is right on target, namely for political education. This is based on the fulfillment of the six variables of the Policy Implementation Model proposed by Van Meter & Van Horn which include; (1) Standards and objectives, (2) Supporting resources, (3) Communication and strengthening activities between organizations, (4) Characteristics of implementing positions, (5) Economic, political, and social support, and (6) Disposition of implementers.

Keywords: Policy Implementation, Financial Assistance, Political Parties.

ABSTRAK

Penelitian ini bertujuan untuk menganalisa dan menguraikan tentang Standar dan tujuan, Sumber daya pendukung, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi, Karakteristik jawatan pelaksana dalam pengelola, Kondisi ekonomi politik dan sosial, serta Disposisi pelaksana dalam pengelola bantuan keuangan partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok. Penelitian ini menggunakan metode deskriptif dengan pendekatan kaulitatif, dengan Teknik pengumpulan data melalui observasi dan wawancara. Teknik analisis data dilakukan melalui pengumpulan data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimplkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan Kota Depok sudah tepat sasaran yakni untuk pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada telah terpenuhinya keenam variabel Model Implementasi Kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter & Van Horn yang meliputi; (1) Standar dan tujuan, (2) Sumber daya penunjang, (3) Komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi, (4) Karakteristik jawatan pelaksana, (5) Dukungan ekonomi, politik, dan sosial, dan (6) Disposisi pelaksana.

Kata kunci: Implementasi Kebijakan, Bantuan Keuangan, Partai Politik.

PENDAHULUAN

Partai Politik sebagai organisasi yang hidup di tengah masyarakat, memiliki kewajiban salah satunya yaitu menyerap, merumuskan, dan mengagregasi kepentingan masyarakat. Sedangkan sebagai organisasi yang menempatkan kader-kadernya di lembaga legislatif maupun eksekutif, partai politik

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



menyampaikan dan memperjuangkan kepentingan rakyat melalui kebijakan pemerintah. Partai politik sebagai organisasi yang dapat mengantarkan para politisi menduduki jabatan membutuhkan dana besar untuk memenangkan perebutan kursi jabatan politik dalam pemilu (Imelda & Novianti, 2023).

Saat ini keberadaan partai politik di Republik ini merupakan salah satu elemen yang memiliki peranan sangat penting dan vital terhadap berjalannya seluruh proses dinamika dalam negara yang berwajah demokrasi seperti Indonesia (Abeje, 2013). Karena ia menjadi tolak ukur kemajuan suatu Negara ketika menjalankan segala fungsinya secara profesional. Hal ini sangat esensial apalagi berada di posisi negara yang memerankan suatu format sistem Demokrasi (Satidporn & Thananithichot, 2023). Negara dikatakan maju ketika sistem politiknya tertata dengan stabil, rapi, dan baik begitupun sebaliknya sistem politik yang stabil dan baik maka, negara tersebut adalah negara maju (Nurimansyah & Ariyani, 2020).

Dalam menjalankan kegiatannya, partai politik akan memiliki pengeluaran-pengeluaran yang berkaitan dengan tugas dan fungsinya (Bolleyer & Ruth, 2018). Oleh karena itu, partai politik harus mempunyai sumber keuangan yang jelas dan dikelola dengan baik, agar tugas dan fungsi partai politik tersebut dapat berjalan sebagaimana mestinya (Belanja et al., 2021). Prioritas penggunaan bantuan keuangan kepada partai politik diatur dalam Pasal 34 ayat (3a) UU No 2 Tahun 2011 Perubahan atas UU No. 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik yang menyebutkan bahwa Bantuan keuangan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/ Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat. Selanjutnya dalam Pasal 34 ayat (3b) menyatakan bahwa Pendidikan Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (3a) berkaitan dengan kegiatan; Pendalaman mengenai empat pilar berbangsa dan bernegara yaitu Pancasila, UUD 1945, Bhinneka Tunggal Ika dan Negara Kesatuan Republik Indonesia; Pemahaman mengenai hak dan kewajiban warga negara Indonesia dalam membangun etika dan budaya politik; dan pengkaderan anggota partai politik secara berjenjang dan berkelanjutan (Tangkere et al., 2021).

Nominal bantuan keuangan kepada partai politik termaksud dalam PP Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Pasal 5 Besar Bantuan keuangan kepada partai politik tingkat pusat yang mendapatkan kursi di DPR RI sebesar Rp. 1.000,00 (seribu rupiah) per suara sah (Mughtar, 2013). Sedangkan besaran nilai bantuan keuangan kepada paratiai politik tingkat provinsi yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi sebesar Rp. 1.200,00 (seribu dua ratus rupiah) per suara dan untuk besaran nilai bantuan keuangan kepada partai politik tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota sebesar 1.500,00 (seribu lima ratus rupiah) per suara. Bantuan keuangan bagi partai yang mendapatkan kursi di DPR bersumber dari APBN, partai yang mendapatkan kursi di DPRD Provinsi bersumber dari APBD Provinsi dan partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD Kabupaten/Kota bersumber dari APBD Kabupaten/Kota (Basri, 2021).

Prioritas penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik juga diatur dalam PP No 1 Tahun 2018 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik. Pasal 9 ayat (1) Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan Masyarakat (Sinaga et al., 2018). Meskipun Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik diprioritaskan untuk membiayai fungsi pendidikan politik untuk kader partai dan masyarakat, masih banyak partai politik sekarang ini yang tidak mampu untuk menunjuk kadernya sendiri dalam penyelenggaraan pemilu presiden dan pilkada (Nasir, 2016).

Atas berbagai sumber dana yang diterima, sebagian besar partai politik hanya memiliki laporan keuangan yang berasal dari APBN dan APBD (Ansyari et al., 2019). Partai politik cukup taat membuat laporan tersebut karena jika laporan itu tidak dibuat maka dana bantuan keuangan berikutnya akan berkurang. Sayangnya, partai politik sering terlambat dalam memberikan laporan tersebut (Aulia, 2016). Walaupun terlambat, Pemerintah melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) tetap mengucurkan anggaran untuk partai politik pada tahun berikutnya. Persoalan transparansi atas pendanaan partai politik masih menjadi tantangan hingga saat ini (Pinilih, 2017).

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Permasalahan yang terkadang muncul dalam pengelolaan bantuan keuangan bagi partai politik di Indonesia, adalah penggunaan bantuan keuangan tersebut lebih besar porsinya bagi pembiayaan kegiatan operasional sekretariat partai dibandingkan untuk pendidikan politik bagi anggota partai yang bersangkutan (Erlina, 2023). Permasalahan penggunaan bantuan keuangan partai politik yang cenderung lebih banyak digunakan untuk operasional daripada untuk pendidikan politik juga terjadi di Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok. PDI Perjuangan Kota Depok sendiri berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 hanya mendapatkan 10 kursi turun 1 kursi dari tahun 2014. Perolehan ini sebagaimana tertuang dalam Surat KPU RI Nomor 1057/PL.01.9 SD/03/KPU/VII/2019 perihal Penetapan Perolehan Kursi dan Calon Terpilih, di mana posisi PDIP yang semula menjadi pemenang pada Pemilihan Legislatif tahun 2014 merosot diposisi kedua di bawah Partai Keadilan Sejahtera (PSK) yang memiliki 12 kursi.

Meskipun demikian namun dengan perolehan total suara 184.000 atau 18,32% pada Pemilihan Legislatif tahun 2019 masih menempatkan Partai PDI Perjuangan sebagai salah satu partai dengan alokasi anggaran yang tergolong besar jika dibandingkan dengan beberapa partai lainnya. Berdasarkan Peraturan Pemerintah RI Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik maka partai tingkat kabupaten/kota yang mendapatkan kursi di DPRD kabupaten/kota akan menerima dana bantuan sebesar Rp1.500 per suara sah. Berdasarkan perhitungan tersebut maka anggaran yang diterima oleh PDI Perjuangan setiap tahunnya mencapai Rp. 276.000.000 yang dihasilkan dari 184.000 suara sah yang diperoleh dikali Rp.1.500.

Anggaran yang digelontorkan untuk PDI Perjuangan yang berasal dari transfer pusat ke daerah diperuntukan untuk hal yang krusial dalam penyelenggaraan partai politik yaitu kaderisasi. Hal ini mengingat bahwa kaderisasi merupakan fungsi utama dalam partai politik sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang nomor 2 tahun 2011 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 2 tahun 2008 tentang Partai Politik pasal 11 ayat 1 berbunyi "Partai politik berfungsi sebagai sarana pendidikan politik bagi anggota dan masyarakat luas agar menjadi warga negara Indonesia yang sadar akan hak dan kewajibannya dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara".

Meskipun demikian namun dalam penyelenggaraannya, Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok lebih banyak mengalokasikan anggaran yang diterima untuk biaya operasional. Hal ini tentunya berdampak pada tidak optimalnya penggunaan anggaran terhadap proses pendidikan politik yang pada akhirnya cenderung pasif dari yang seharusnya diamanatkan. Fenomena tersebut tentunya menjadi problematika tersendiri, yang tanpa disadari akan mempengaruhi proses kaderisasi yang bertujuan untuk mempersiapkan SDM berkualitas dalam menghadapi pertarungan politik baik di legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan permasalahan yang telah diuraikan tersebut, maka penelitian ini akan secara spesifik terfokus pada proses implementasi kebijakan Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023. Adapun tujuan dari dilakukannya penelitian ini adalah untuk menganalisa dan menguraikan tentang Standar dan tujuan, Sumber daya pendukung, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi, Karakteristik jawatan pelaksana dalam pengelola, Kondisi ekonomi politik dan sosial, serta Disposisi pelaksana dalam pengelola bantuan keuangan partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok.

METODE

Dalam melakukan penelitian tentang implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023, peneliti memilih menggunakan paradigma Konstruktivisme dibandingkan tiga paradigma lainnya yaitu *Positivisme*, *Post-Positivisme*, dan *Kritis*. Paradigma ini hampir merupakan antithesis terhadap paham yang menempatkan pentingnya pengamatan dan objektivitas dalam menemukan suatu realitas atas ilmu pengetahuan (Djamba &

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Neuman, 2002). Konstruktivisme adalah sebuah teori yang memandang bahwa individu menafsir dan bertindak menurut kategori konseptual yang ada dalam pikiran. Realitas tidak menghadirkan dirinya dalam bentuk kasar, tetapi harus disaring melalui cara seseorang melihat sesuatu (King et al., 1995).

Adapun pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah kualitatif sebagaimana disebutkan (Malindir & Septiansyah, 2024). Menurut Creswell (Malindir et al., 2022) bahwa pendekatan penelitian adalah rencana dan prosedur penelitian yang mencakup langkah-langkah asumsi luas hingga metode pengumpulan, analisis, dan interpretasi data yang terperinci. Pemilihan pendekatan kualitatif ini didasarkan pada tujuan peneliti untuk menganalisa dan mendeskripsikan tentang implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023.

Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan yakni studi pustaka dan studi lapangan yang meliputi observasi dan wawancara (Malindir & Rahman, 2023). Dalam proses ini, data penelitian yang digunakan berupa sumber data primer dan sumber data sekunder (Somantri, 2005). Dalam proses pengumpulan data pada penelitian ini, penentuan informan didasarkan pada pihak-pihak yang berhubungan langsung dengan masalah penelitian yang diangkat. Dengan memilih informan, maka peneliti wajib memahami siapa saja yang akan menjadi informan, sesuai kapasitas yang dimiliki, dan harus sesuai dengan yang dibutuhkan peneliti dalam penelitian tentang implementasi kebijakan penggunaan bantuan keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh Dewan Pimpinan Cabang Partai Demokrasi Indonesia (PDIP) Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023.

Selanjutnya dalam proses analisis data dilakukan secara simultan dengan pengumpulan data, artinya peneliti dalam mengumpulkan data juga menganalisis data yang diperoleh di lapangan. Aktivitas dalam analisa data mencakup data *reduction*, data *display*, dan *conclusion drawing/ verification* (Creswell & Creswell, 2018). Setelah data dianalisis maka selanjutnya dilakukan validitas dan reliabilitas data dengan menggunakan teknik triangulasi (*triangulate*), yaitu pemeriksaan data dengan membandingkan data lain, dengan informasi dari peneliti lain, atau pun melakukan *check and cross-check* terhadap sumber-sumber lain.

PEMBAHASAN

Berkaitan dengan implementasi kebijakan penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam meningkatkan pendidikan politik di Dewan Pimpinan Cabang (DPC) Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan di kota Depok tahun 2021-2023, maka pada bagian ini akan diuraikan secara detail temuan di lapangan dengan mengacu pada Model van Meter dan van Horn (Meter & Horn, 2014) terdiri atas enam variabel yaitu; Standar dan tujuan kebijakan, Sumber daya kebijakan, Komunikasi dan aktivitas penguatan antar organisasi, Karakteristik jawatan pelaksana, Kondisi ekonomi, politik, dan sosial. dan Disposisi pelaksana.

A. Standar dan Tujuan Kebijakan

Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2018 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik pasal 9 ayat (1) disebutkan bahwa “Bantuan keuangan kepada Partai Politik diprioritaskan untuk melaksanakan pendidikan politik bagi anggota Partai Politik dan masyarakat” maka jelas bahwa aturan yang dibuat menjadi standar dengan tujuan bahwa terlaksananya pendidikan politik bagi kader maupun masyarakat.

Standar dan sasaran kebijakan harus jelas dan terstruktur sehingga dapat direalisasikan. Apabila standar dan sasaran kebijakan kabur, maka akan terjadi multiinterpretasi dan mudah menimbulkan konflik di antara para agen implementasi. Mengukur kerja implementasi kebijakan tentunya akan menegaskan standar dan sasaran tertentu yang harus dicapai oleh para pelaksana kebijakan, kinerja kebijakan pada dasarnya merupakan penilaian atas tingkat ketercapaian standar dan sasaran tersebut.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Hal tersebut tentunya berlaku juga bagi Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok yang mana harus memprioritaskan penggunaan anggaran untuk pendidikan politik. Dengan begitu maka tujuan dari penggunaan anggaran jelas untuk menghasilkan kader-kader unggul yang akan didistribusikan untuk mengikuti kontestasi baik Pemilihan Legislatif maupun Kepala Daerah khususnya di Kota Depok atau pada tingkatan yang lebih tinggi baik di Provinsi Jawa Barat maupun nasional.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok mengacu pada standar yang telah ditetapkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan Partai Politik. Sesuai dengan jumlah yang diterima berdasarkan jumlah suara yang diraih berdasarkan hasil Pemilihan Umum Legislatif tahun 2019, keuangan digunakan untuk berbagai kegiatan baik dari tingkat DPC sampai dengan anak ranting.

Berkaitan dengan standar dan tujuan dari penggunaan anggaran tersebut sebagaimana disampaikan oleh informan yang tidak lain adalah Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Jadi kalau berbicara tentang standar kan jelas kita harus mengacu di Peraturan Pemerintah (PP) Nomor 1 tahun 2018 bahwa untuk anggaran yang diberikan dari pemerintah ke DPC PDIP Kota Depok sebaik-baiknya harus dipergunakan untuk pendidikan politik atau kaderisasi, maupun aktivitas partai lainnya. Meskipun kalau kami mau jujur, anggaran 276 juta setiap tahun ini kecil untuk pembiayaan partai sebesar PDIP Kota Depok. Kami punya 11 Ranting, dan ribuan kader yang harus terus kami rawat, sedangkan kondisi keuangan dari pemerintah menurut kami cukup minim. Walaupun dibidang bahwa anggota DPRD kami banyak, ya tapi berapa sih gaji DPRD setingkat kabupaten/kota, jadi kami tidak mungkin bergantung secara finansial kepada 10 anggota DPRD Kota Depok terpilih dari PDI perjuangan.”

Meskipun tergolong patuh pada standar dan tujuan dari kebijakan penggunaan anggaran bantuan dana Partai Politik, namun jelas bahwa bukan hanya pendidikan politik yang menjadi pos sentral. Melainkan pada kegiatan operasional lainnya seperti penghidupan struktur yang ada di bawah DPC dan penguatan kader. Kondisi tersebut tentu menjadi problem tersendiri mengingat bahwa bantuan keuangan dari pemerintah yang bersumber pada APBN tersebut diprioritaskan untuk pendidikan politik dari Parpol. Penggunaan anggaran bantuan keuangan partai politik untuk kegiatan lain seperti penguatan struktur ditingkat bawah tersebut diperkuat dengan jawaban informan berikutnya yang merupakan bendahara DPC PDI perjuangan Kota Depok yang menyatakan bahwa:

“Dalam aturan yang telah ditetapkan oleh pemerintah pusat maka kami DPC PDI Perjuangan Kota Depok sebagai penerima anggaran mempergunakan sebaik mungkin sesuai dengan peruntukannya baik untuk kaderisasi maupun kegiatan-kegiatan DPC lainnya. Dan selama ini itu sudah kami lakukan dengan bantuan keuangan 276 juta setiap tahunnya. Saya selaku bendahara tau betul post anggaran kami selama ini lebih banyak digunakan untuk memperkuat struktur di tingkatan PAC, ranting maupun anak ranting.”

Penggunaan bantuan keuangan Partai Politik yang cenderung lebih banyak dihabiskan untuk kegiatan non-pendidikan politik ini menjadi masalah tersendiri. Peruntukan dana partai politik yang bersumber dari APBN ini sebagaimana tertuang dalam Peraturan Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 bertujuan agar partai politik dapat meningkatkan kapasitas dari para kader sebelum nantinya didistribusikan untuk mengisi jabatan-jabatan politik baik dilegislatif maupun eksekutif.

Dengan anggaran yang tergolong terbatas tersebut, partai politik sebaik mungkin dapat secara mandiri mencari sumber anggaran lain baik berupa iuran maupun usaha mandiri guna untuk memenuhi penghidupan partai begitupun dengan DPC PDI perjuangan Kota Depok. Karena pada dasarnya bantuan keuangan partai sesuai dengan standar dan tujuannya diprioritaskan untuk pendidikan politik dibandingkan kegiatan operasional lainnya.

Meskipun demikian, sebagian kader tidak mau tau dengan alokasi anggaran bantuan untuk partai politik, dan beranggapan bahwa apa yang dilakukan oleh DPC PDI Perjuangan selama ini sudah sesuai. Hal tersebut disampaikan oleh Army Mulyano selaku kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “Berbicara bantuan keuangan Parpol in ikan sensitif ya, ada penggunaan dan ada laporannya. Tapi saya rasa sejauh ini DPC PDI Kota Depok sudah melaksanakan dengan baik”.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



Anggapan bahwa anggaran bersifat sensitif sehingga tidak banyak yang ingin tau tentang alokasi bantuan dana partai politik yang didapatkan oleh DPC PDI Perjuangan setiap tahunnya. Hal tersebut justru akan berdampak pada penggunaan anggaran yang tidak sesuai dengan peruntukannya. Yang mana seharusnya penggunaan anggaran harus lebih terbuka dan transparan bukan hanya kepada lembaga pemerintah yang berwenang untuk mengaudit seperti BPK, melainkan kepada seluruh kader PDI Perjuangan Kota Depok.

Hasil penelitian juga menunjukkan bahwa bantuan dana partai politik yang diterima setiap tahun juga cenderung tidak diketahui secara jelas oleh para kader bukan hanya dalam proses pengalokasiannya melainkan juga tujuan dari anggaran tersebut. Padahal jika dianalisa lebih jauh bahwa kader partai politik merupakan sasaran dari anggaran bantuan Parpol yang bersumber dari APBN salah satunya melalui pendidikan politik.

Minimnya informasi dari para kader ini jelas terlihat dari hasil wawancara yang dilakukan dengan Rahma Charlian selaku kader PDI Perjuangan Kota Depok yang menyebutkan bahwa “Ohh untuk standar sendiri kan tentu mengacu pada aturan yang berlaku selama ini. Kalau untuk tujuannya bagi saya tentu untuk perkembangan partai baik kaderisasi maupun untuk penguatan kelembagaan terkhusus ditingkat kota seperti kami jadi bukan cumin untuk pengurus pusat saja”.

Jika mengacu pada standar yang telah ditetapkan sebelumnya di Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik maka orientasi pengurus partai bukan hanya difokuskan pada bagaimana anggaran tersebut dapat digunakan dan tidak tersisa, namun proses penggunaan anggaran yang transparan dan akuntabel juga perlu diperhatikan dalam hal ini oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok.

Berdasarkan hasil penelitian tersebut mengacu pada Model van Meter dan van Horn, maka penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang PDI Perjuangan Kota Depok belum memenuhi variabel pertama yakni standar dan tujuan. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan anggaran bantuan partai politik tidak diprioritaskan untuk pendidikan politik melainkan untuk operasional kegiatan partai baik ditingkat DPC, PAC, ranting sampai anak ranting. Yang seharusnya agenda diluar dari peruntukan bantuan dana Parpol dapat diperoleh secara mandiri sehingga bantuan yang bersumber pada APBN dapat difokuskan kepada pendidikan politik. Dengan begitu maka, peningkatan kapasitas kader dapat dilakukan sebelum nantinya didistribusikan untuk mengikuti Pemilu.

B. Sumber Daya Kebijakan

Dalam proses implementasi perlu dukungan sumber daya baik sumber daya manusia (*human resource*) maupun sumber daya non-manusia (*non-human resource*). Keberhasilan implementasi sangat tergantung dari kemampuan dalam memanfaatkan sumber daya yang tersedia. Manusia merupakan sumber daya yang terpenting dalam menentukan keberhasilan suatu implementasi kebijakan. Setiap tahap implementasi menuntut adanya sumber daya manusia yang berkualitas sesuai dengan pekerjaan yang dilimpahkan oleh kebijakan yang telah ditetapkan secara politik. Selain sumber daya manusia, sumber daya financial dan waktu menjadi perhitungan penting dalam keberhasilan implementai kebijakan.

Begitupun dalam hal implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik. Agar dana bantuan yang diterima dapat digunakan sesuai dengan peruntukannya salah satunya untuk pendidikan politik, maka DPC PDI Perjuangan Kota Depok harus memiliki dukungan sumber daya yang mumpuni, baik sumber daya manusia maupun sumber daya penunjang lainnya.

Berdasarkan hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, dari segi sumber daya manusia, DPC PDI Perjuangan Kota Depok sudah mumpuni dalam menunjang terealisasinya pendidikan politik menggunakan bantuan anggaran partai politik yang diterima. Begitupun dengan dukungan sumberdaya penunjang lainnya. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh informan utama yakni Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau soal SDM yang kami miliki di DPC PDIP Kota Depok saya rasa sudah mumpuni secara kapasitas ya. Namun harus diakui bahwa dengan 13 pengurus yang ada baik saya selaku Ketua,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



sekretaris, bendahara, maupun para wakil ketua bidang masih sedikit terkendala untuk mengurus seluruh kader yang ada diakar rumput. Karena PDIP ini bukan partai kemarin sore, sehingga kami punya ribuan kader yang tersebar di 11 kecamatan yang ada di Kota Depok ini. Maka kami sering memaksimalkan para ketua PAC yang ada di tiap kecamatan seKota Depok. Hanya kendalanya ya anggaran lagi yang harus kami gelontorkan ke PAC karena rata-rata dari mereka tidak terlalu kuat dari segi ekonomi dan ketersediaan fasilitas.”

Dengan dukungan dari 11 Pengurus Anak Cabang (PAC) di 11 Kecamatan yang tersebar, dan pengurus ranting maupun anak ranting yang ada di tingkat RT/RW, dianggap menjadi support utama dalam terealisasinya penggunaan anggaran untuk kegiatan pendidikan politik. Meskipun diakui bahwa dengan jumlah yang diterima tidak terlalu mumpunya untuk digunakan secara menyeluruh mengingat bahwa struktur kader yang cukup banyak.

Di sisi lain, hasil penelitian juga menunjukkan bahwa selain mumpuni dari segi jumlah, secara kapasitas pengurus baik di tingkat DPC maupun PAC dan ranting mumpuni secara kapasitas sehingga menjadi support berikutnya dalam menunjang terealisasinya pendidikan politik. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh informan yang merupakan bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau untuk SDM saya kira kita tidak ada masalah karena kami punya pengurus yang mumpuni secara kapasitas dan kami punya pengurus sampai di tingkat anak ranting yang solid. Kapasitas dan Solidaritas pengurus dan kader inilah yang menjadi output dari pendidikan politik yang sudah kami lakukan selama ini bukan hanya baru menjelang Pemilu atau baru dilakukan satu tahun terakhir ini saya kira.”

Selain dukungan dari segi jumlah dan kapasitas pengurus, solidaritas pengurus juga dianggap menjadi faktor pendukung berikutnya dalam hal pelaksanaan kegiatan-kegiatan DPC PDI Perjuangan Kota Depok termasuk pendidikan politik. Output dari pendidikan juga diyakini sebagai bagian dari penunjang bagi kader yang akan didistribusikan untuk bertarung dalam Pemilu baik legislatif maupun eksekutif. Pendidikan politik yang dilakukan selama 1 kali dalam 3 bulan dianggap menjadi pengutan sesuai dengan intruksi yang diturunkan oleh Ketua Umum PDI Perjuangan yakni Megawati Soekarno Putri. Hal tersebut seperti yang dikemukakan oleh Army Mulyanto sebagai kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “SDM kami mumpuni, kami para kader juga solid di bawah kepemimpinan Ketua Umum Bu Megawati dan Ketua DPC. Untuk pendidikan politik sejauh yang saya tau selaku kader ya berjalan dengan baik dan itu dilakukan setiap 3 bulan sekali.”

Apa yang disampaikan oleh para informan tentunya menunjukkan bahwa realita di lapangan mendukung bagi terealisasinya penggunaan bantuan dana partai politik untuk kebutuhan partai yang diperuntukan yakni pendidikan politik. Karena pada dasarnya, secara historis dapat dilihat bahwa PDI Perjuangan merupakan salah satu partai politik di Indonesia yang lahir sejak jaman Orde Baru dan hari ini menjelma menjadi partai penguasa di Indonesia. Suatu partai dapat menjadi besar apabila proses pendidikan politik dan kaderisasi terus dilakukan secara masif. Begitupun sebaliknya, banyak juga partai baru yang muncul dan kemudian tidak memiliki kekuatan lebih dalam mempengaruhi kebijakan atau lolos di parlemen dikarenakan kurangnya pendidikan politik dan penguatan terhadap para kader. Meskipun PDI Perjuangan cenderung terlalu kaku dan bergantung para keturunan Soekarno yang diyakini sebagai inspirasi dari partai berlambang banteng tersebut, namun harus diakui bahwa dalam hal kaderisasi, PDI Perjuangan cukup berhasil.

PDI Perjuangan Kota Depok, selain dari bantuan keuangan yang diberikan oleh pemerintah, juga memiliki sumber pemasukan lainnya seperti iuran kader dan usaha lainnya. Sehingga dalam penyelenggaraan partai, sangat menunjang termasuk dalam hal pendidikan politik. Hal tersebut diungkapkan oleh Rahma Carlian selaku kader DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “Sumber daya yang tersedia di DPC PDI Perjuangan Kota Depok baik manusia maupun sumber daya pendukung lainnya saya rasa mumpuni sehingga sangat mendukung setiap program yang ada ya salah satunya pendidikan politik.”

Dengan ketersediaan sumber daya manusia maupun sumber daya pendukung lainnya, maka penggunaan bantuan dana partai politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok dapat diprioritaskan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



untuk terlaksananya pendidikan politik. Jika konsisten dalam melakukan pendidikan politik maka akan membantu memperkuat PDI Perjuangan yang saat ini menjadi salah satu partai penguasa Parlemen khususnya di Kota Depok. Mengingat bahwa output dari pendidikan politik adalah meningkatkan kapasitas kader sebelum nantinya akan didistribusikan untuk bertarung dalam kontestasi Pemilu baik diranah legislatif maupun eksekutif.

Berdasarkan uraian hasil penelitian tersebut maka secara keseluruhan dapat dianalisa bahwa dalam penggunaan bantuan dana partai politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam meningkatkan pendidikan politik telah memenuhi unsur sumber daya penunjang. Hal ini didasarkan pada ketersediaan SDM yang mumpuni baik secara jumlah maupun kapasitas serta sumber daya penunjang lainnya yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

C. Komunikasi dan Aktivitas Penguatan Antar Organisasi

Dalam berbagai kasus implementasi, sebuah program terkadang perlu dukung dan koordinasi dengan instansi lain agar tercapai keberhasilan kebijakan yang diinginkan. Berkaitan dengan penelitian ini maka koordinasi baik antar DPC PDI Perjuangan Kota Depok dengan Pemerintah dan BPK selaku lembaga audit, maupun dengan internal pengurus baik di DPC, PAC maupun ranting dan anak ranting perlu dilakukan. Sehingga upaya untuk meningkatkan pendidikan politik melalui anggaran yang diterima setiap tahunnya oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok dapat terwujud.

Komunikasi juga menjadi salah satu solusi untuk terwujudnya penguatan organisasi baik ditingkatkan DPC, PAC sampai anak ranting. Karena pendidikan politik yang dicitakan tidak akan terwujud jika organisasi secara struktur tidak kuat atau solid. Dengan anggaran 276juta setiap tahun yang diterima, harus dapat membantu penguatan organisasi PDI Perjuangan di Kota Depok. Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, diketahui bahwa penggunaan bantuan dana Parpol yang diterima oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok lebih diprioritaskan untuk pendidikan politik. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Untuk komunikasi sejauh ini lancar dan saya rasa tidak ada masalah, baik itu kami internal ditingkatkan DPC maupun ditingkatkan PAC, sampai dengan ranting dan anak ranting yang ada di RT, RW dan kelurahan. Hanya balik lagi, kalau persoalan anggaran yang kami dapat setiap tahun ini hanya diperuntukan untuk hal-hal yang penting saja karena tidak mampu untuk mengcover seluruh kebutuhan baik kami di DPC, PAC, Ranting dan Anak Ranting se Kota Depok. Karena kalau kami keluarkan untuk 1 PAC atau Ranting dan yang lain ga kebigian kan takutnya muncul kecemburuan. Tapi rekan-rekan di bawah juga paham, sehingga mereka ada juga yang membuka kran-kran mandiri maupun usaha untuk pemenuhan kebutuhan organisasi.”

Penggunaan anggaran bantuan yang diterima dengan dibatasi untuk kegiatan-kegiatan tertentu seperti pendidikan politik mengingat bahwa selain menjadi hal yang penting dalam penyelenggaraan partai politik, juga dikarenakan jumlah yang diterima sangat sedikit bila harus digunakan untuk hal-hal lain seperti operasional partai. Oleh karena itu, partai perlu membuat pos anggaran penerimaan yang baru diluar dari bantuan keuangan partai politik yang bersumber pada APBN. Penggunaan anggaran untuk kegiatan tertentu seperti pendidikan politik didasarkan pada adanya pertanggung jawaban keuangan dari DPC PDI Perjuangan Kota Depok kepada BPK terkait dengan setiap penggunaan dari anggaran yang diterima. Sehingga anggaran yang diterima tidak dengan leluasa digunakan untuk kepentingan lain diluar dari peruntukannya.

Untuk memperkuat post anggaran untuk penyelenggaraan partai, maka DPC PDI Perjuangan Kota Depok juga memiliki sumber pendapatan lainnya yang bersumber dari iuran anggota. Hal tersebut sejalan dengan yang disampaikan oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau urusan keuangan ya jelas komunikasi kami dengan pihak Pemerintah dan kami pun dalam hal pertanggung jawabannya dari penggunaan anggaran kami melaporan ke lembaga terkait seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Jadi kami juga tidak sembarangan menggunakan anggaran yang bersumber daya keuangan negara. Ya makanya kami di DPC PDI Perjuangan juga

memiliki iuran anggota dan usaha lainnya sehingga kami dalam melakukan kegiatan seperti kaderisasi dan pendidikan politik tidak sepenuhnya bergantung pada dana dari pemerintah.”

Pertanggung jawaban terhadap penggunaan bantuan dana partai politik ini pada dasarnya merupakan hal yang wajib. Mengingat bahwa segala sesuatu yang terkait dengan jabatan publik maupun keuangan negara harus dikontrol agar tidak menyimpang dalam penggunaannya. Hal ini didasarkan pada asas akuntabilitas dan transparansi yang harus ditaati oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

Komunikasi dan penguatan organisasi yang terbangun dalam internal PDI Perjuangan Kota Depok salah satunya dilandaskan pada aturan dasar yang dimiliki oleh partai. Hal tersebut diungkapkan oleh Armi Mulyanto selaku kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “Kami selaku kader PDI Perjuangan selalu menjunjung tinggi solidaritas dan berpegang teguh pada AD/ART partai. Jadi kalau kami diintruksikan untuk mengikuti pendidikan atau melakukan pembasisan demi kemenangan PDI Perjuangan di Kota Depok ya kami selalu *all out* untuk itu.”

Doktrin untuk berpegang teguh pada aturan dasar yang dimiliki oleh partai menjadi dasar yang kuat agar para pengurus dan kader tetap loyal. Begitupun dalam hal peningkatan pendidikan politik yang ditunjang dengan bantuan dana partai politik. Tentunya dalam proses pendidikan politik yang dilakukan oleh partai politik, doktrin partai selalu disematkan dengan harapan bahwa selain dibentuk menjadi kader yang memiliki kapasitas, juga selalu loyal dan patuh terhadap aturan dan intruksi pimpinan.

Hasil penelitian di lapangan juga menunjukkan bahwa proses komunikasi yang dilakukan oleh PDI Perjuangan Kota Depok bersifat dua arah, baik dari pimpinan kepada para kader maupun sebaliknya. Hal tersebut disampaikan oleh Rahma Charlian bahwa “Yang saya tau sejauh ini komunikasi di PDI Perjuangan antar pengurus dengan kami para kader sangat baik. Baik itu yang bersifat intruksi dari pimpinan, maupun koordinasi dari bawah. Termasuk ya soal pendidikan politik sejauh ini lancar dan kami selalu dilibatkan”.

Fenomena yang terjadi di lapangan tersebut menjadi poin positif bagi PDI Perjuangan. Melalui komunikasi yang baik dan pengutan kelembagaan tentunya akan memperkuat terwujudnya penggunaan bantuan dana partai politik dalam upaya peningkatan pendidikan politik. Dengan begitu maka PDI Perjuangan dalam menjadi semakin kuat dan dapat terus berada diposisi atas perolehan suara pada Pemilu baik legislatif maupun eksekutif khususnya di Kota Depok.

Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dianalisa bahwa penggunaan bantuan dana partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok sudah memenuhi unsur ketiga yakni komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi sebagaimana dikemukakan oleh Van Meter dan van Horn (1975) dalam teori Model Kebijakan. Hal tersebut didasarkan pada proses komunikasi yang sudah terjalin dengan baik di internal PDI Perjuangan Kota Depok termasuk dalam hal pendidikan politik. Disisi lain, komunikasi juga dilakukan dalam rangka penguatan kelembagaan baik ditingkat DPC, PAC, ranting, maupun anak ranting.

D. Karakteristik Jawatan Pelaksana

Karakteristik jawatan pelaksana ini mencakup struktur organisasi, norma-norma dan pola-pola yang terjadi dalam organisasi, yang semuanya akan mempengaruhi implementasi suatu program. Berkaitan dengan penelitian ini maka karakteristik jawatan pelaksana berkaitan dengan struktur, norma, dan pola yang penyelenggaraan organisasi DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam kaitannya dengan penggunaan bantuan dana partai politik.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam penyelenggaraannya berpedoman pada aturan organisasi yang berlaku. Sehingga diharapkan bahwa norma yang akan terbangun baik dalam organisasi maupun pada pengurus dan kader DPC PDI Perjuangan Kota Depok juga sesuai dengan kehendak dari partai itu sendiri. DPC PDI Perjuangan Kota Depok juga dalam penyelenggaraannya, selalu menempatkan kepentingan masyarakat di atas kepentingan partai, dengan harapan bahwa PDI Perjuangan oleh masyarakat Kota Depok tidak dipandang berorientasi pada jabatan

politik semata. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau kami di PDIP Kota Depok khususnya saya selaku ketua seingkali menekankan kepada seluruh pengurus bahwa tempatkan kepentingan rakyat di atas segalanya, dan jadikan kebutuhan para kader di akar rumput (bawah) sebagai orientasi untuk dipenuhi. Karena itu semua pesan dari Ibu Mega kepada kami dan kami harus menanamkan itu. Jadi Partai Wong Cilik itu bukan sekedar jargon, tapi lebih dari pada itu ya sudah menjadi perhatian dan fokus dari PDI Perjuangan. Apalagi soal pendidikan, di PDI Perjuangan, kami selalu menjadikan pendidikan politik sebagai alternatif dalam meningkatkan kualitas dari para kader.”

Slogan PDI Perjuangan sebagai partai wong cilik kemudian mempertegas posisi organisasi yang selalu ingin dekat dengan masyarakat. Begitupun dalam hal pendidikan politik, DPC PDI Perjuangan selalu memprioritaskan pada kebutuhan kader sebagai bagian dari upaya untuk meningkatkan kapasitas dari para kader sebelum nantinya akan didistribusikan untuk mengikuti Pemilihan Umum bagi di legislatif maupun eksekutif.

Meskipun demikian namun diakui bahwa selain dari kegiatan pendidikan politik, bantuan dana partai politik yang diterima setiap tahunnya oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok juga digunakan untuk kegiatan operasional partai lainnya. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa: “Sejauh ini karena saya selaku bendahara jadi saya tau betul bahwa anggaran yang kami terima dari pemerintah kami gunakan sebaik mungkin untuk pendidikan politik, kaderisasi, maupun untuk kegiatan-kegiatan DPC yang lain. Karena Namanya penggunaan anggaran negara pasti berat pertanggung jawabannya sehingga kami tidak sembarangan menggunakan anggaran yang ada.”

Meskipun demikian, DPC PDI Perjuangan dengan penuh kehati-hatian menggunakan bantuan dana yang diterima sebaik mungkin untuk menghindari adanya penyimpangan dalam penggunaan anggaran dan proses audit yang akan dilakukan oleh lembaga berwenang dalam hal ini BPK. Proses pelaporan dan pertanggung jawaban tersebut menjadi penting mengingat bahwa, seluruh bentuk kegiatan yang bersumber pada uang negara harus dikelola dengan asas akuntabilitas.

Tujuan dari pendidikan politik yang dilakukan dengan menggunakan bantuan dana partai politik tersebut dilakukan dengan harapan bahwa terbentuknya kader PDI Perjuangan Kota Depok yang memiliki kapasitas dan siap berkompetisi dalam Pemilihan Umum. Hal tersebut disampaikan oleh informan yakni Armi Mulyanto yang juga merupakan kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau untuk pelaksana saya selaku kader tidak terlalu mengetahui, yang jelas bahwa proses pendidikan dan kaderisasi politik di DPC PDI Perjuangan Kota Depok selalu terlaksana dan para kader selalu antusias untuk itu. Terutama kami para kader yang akan maju dalam Pileg, karena bagi saya tujuan akhirnya pendidikan politik ya mendistribusikan para kader untuk maju bertarung dalam ranah politik.”

Sejauh ini menurut menurut para kader bahwa pengurus DPC PDI Perjuangan memiliki karakter yang merakyat serta profesional dalam penyelenggaraannya. Hal ini sesuai dengan amanat dari Pemerintah Nomor 1 tahun 2018 tentang Bantuan Keuangan untuk Partai Politik bahwa salah satunya pendidikan politik. Fenomena tersebut menunjukkan bahwa norma dan pola yang diadopsi oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok cukup baik dan sesuai dengan aturan yang berlaku.

Di sisi lain, persiapan dalam menghadapi Pemilihan Umum 2024 semakin memperkuat bahwa pendidikan politik menjadi hal yang sangat penting bagi setiap partai politik termasuk DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Rahma Charlian selaku salah satu kader PDI Perjuangan bahwa “Pendidikan politik sejauh ini berjalan dengan baik. Apalagi kan kita dipersiapkan untuk menghadapi Pemilu tahun ini jadi tentu seluruh konsentrasi akan terfokus pada pendidikan politik untuk penguatan kader dan pembasisan di masyarakat”.

Karakteristik jawatan pelaksana ini dapat disebut baik atau optimal apabila norma dan pola penyelenggaraan organisasi DPC PDI Perjuangan juga baik. Hal ini sangat sangat penting dalam menunjang terlaksananya pemanfaatan bantuan dana partai politik dalam upaya peningkatan pendidikan

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id

Indexed:



politik di DPC PDI Perjuangan Kota Depok, sekaligus untuk memperkuat kekuatan partai. Berdasarkan uraian tersebut maka secara umum dapat dikatakan bahwa penggunaan dana bantuan partai politik dalam meningkatkan pendidikan politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok sudah memenuhi unsur keempat dalam Model kebijakan dari Van Meter dan van Horn yakni karakteristik jawatan pelaksana. Hal ini dikarenakan DPC PDI Perjuangan dalam penyelenggaraannya berpegang teguh pada norma yang berlaku serta pola yang digunakan cenderung berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Depok secara umum.

E. Kondisi Ekonomi, Politik, dan Sosial

Variabel ini mencakup sumberdaya ekonomi lingkungan yang dapat mendukung keberhasilan implementasi kebijakan, sejauh mana kelompok- kelompok kepentingan memberikan dukungan bagi implementasi kebijakan, karakteristik para partisipan, yakni mendukung atau menolak, bagaimana sifat opini publik yang ada di lingkungan, dan apakah elite politik mendukung implementasi kebijakan. Berkaitan dengan penelitian ini maka, agar kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik dalam digunakan dengan prioritas kepada pendidikan politik, maka harus diperkuat dengan kondisi politik internal DPC PDI Perjuangan yang baik. Di sisi lain, kondisi ekonomi dari internal organisasi juga harus diperkuat sehingga tidak memunculkan ketergantungan.

Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa, secara ekonomi DPC PDI Perjuangan Kota Depok cukup kuat, mengingat selain mendapatkan bantuan dana partai politik, juga terdapat sejumlah sumber keuangan lainnya seperti iuran dan usaha mandiri. Di sisi lain, Dengan perolehan 10 kursi DPRD berdasarkan hasil Pemilihan Legislatif tahun 2019 secara tidak langsung ingin mempertegas bahwa DPC PDI Perjuangan memiliki dukungan politik yang kuat. Hal tersebut sejalan dengan apa yang dikemukakan oleh informan yang tidak lain adalah Ketua DPC bahwa:

“Dari segi ekonomi bisa dibilang cukup memadai, tapi bukan berarti kuat atau lebih tapi berkecukupan. Dari segi politik saya bisa mengatakan bahwa kami PDI Perjuangan merupakan salah satu yang terkuat di Kota Depok saat ini dengan perolehan 10 kursi hanya berbeda 2 kursi dengan PKS yang berada di posisi pertama. Meskipun kami ada penurunan 1 kursi dari yang sebelumnya 2014 itu 11 kursi, namun saya masih optimis dan yakin bahwa PDI Perjuangan masih sangat dicintai oleh masyarakat Kota Depok. Itulah kenapa kami masih diberikan kepercayaan dengan kursi DPRD yang relatif lebih banyak dari kebanyakan partai lainnya yang ada di Kota Depok ini.”

Meskipun PDI Perjuangan Kota Depok secara posisi turun ke peringkat kedua di bawah PKS yang unggul dengan 12 Kursi, namun dengan 10 suara yang dimiliki seharusnya cukup untuk memperkuat internal dalam konteks politik. Selain dari aspek Ekonomi dan Politik, aspek sosial perlu untuk dipertimbangkan dalam mendukung proses implementasi kebijakan bantuan dana partai politik khususnya di DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

PDI Perjuangan sebagai partai yang besar dan sudah melalui beberapa rezim pemerintahan sehingga membentuk partai ini sebagai salah satu yang tergolong sangat baik dalam pengelolaan organisasi dan penguatannya. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Bendahara DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “Berkaitan dengan aspek ekonomi, politik dan sosial saya rasa partai kami ini bukan partai yang baru sehingga bagi saya sudah dapat dikategorikan mapan dalam segala aspek.”

Kematangan suatu organisasi dengan dukungan ekonomi, politik dan sosial yang mumpuni dapat dipengaruhi oleh lamanya partai tersebut ada dan bagaimana pengelolaannya. Begitupun dengan DPC PDI Perjuangan Kota Depok yang sejauh ini masih menjadi salah satu partai pemenang dalam Pemilihan Legislatif. Selanjutnya, penguatan sosial, dalam hal ini dukungan masyarakat juga perlu dilihat sebagai target yang harus dicapai oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok. Karena bagaimanapun, suara masyarakat yang akan menentukan, lolos atau tidaknya PDI Perjuangan dalam setiap kontestasi Pemilu 5 tahunan khususnya di Kota Depok baik legislatif maupun eksekutif.

Lama berdirinya Partai berlambang banteng ini juga menjadi faktor DPC PDI Perjuangan Kota Depok menjadi kuat dan mandiri baik secara ekonomi, politik, dan sosial. Hal tersebut sejalan dengan yang dikemukakan oleh Armi Mulyanto selaku kader bahwa “Sebagai kader, sejauh yang saya tau bahwa PDI Perjuangan Kota Depok ini mandiri baik secara ekonomi, politik, maupun sosial. Jadi bagi saya sebenarnya ga ada masalah dan kami sangat siap dalam menghadapi segala situasi termasuk Pemilu.” Kemandirian partai akan sangat membantu salah satunya dalam hal pengelolaan bantuan keuangan partai politik yang diterima setiap tahunnya, yang bertujuan salah satunya untuk menunjang pendidikan politik yang dilakukan. Meskipun demikian namun penggunaan bantuan tersebut digunakan dengan sebaik mungkin mengingat bahwa selain dari alokasi dan penggunaan dana, pertanggung jawaban yang bersifat administrasi juga diperlukan.

Hasil temuan di lapangan juga menunjukkan bahwa, bentuk dari kemandirian Partai PDI Perjuangan Kota Depok ditunjukkan dengan agenda pendidikan politik yang selalu terealisasi setiap 3 bulan sekali dengan sasaran yakni para kader yang ada di PAC, ranting sampai dengan anak ranting. Hal tersebut sejalan dengan pandangan Rahma Charlian yang tidak lain adalah kader PDI Perjuangan Kota Depok bahwa “Pastinya saya tidak terlalu tau, tapi tentu yang selama ini kita lihat dan ketahui bahwa jarang terjadi adanya kegiatan pendidikan politik atau kegiatan lainnya yang dibatalkan karena masalah keuangan. Jadi saya rasa baik secara ekonomi, politik dan sosial, PDI Perjuangan Kota Depok cukup mumpuni.”

Berdasarkan uraian tersebut maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa dalam proses implementasi kebijakan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok guna meningkatkan pendidikan politik sudah memenuhi variabel dukungan ekonomi, politik, dan sosial.

F. Disposisi Pelaksana

Disposisi implementor ini mencakup tiga hal yang penting, yakni respons implementor terhadap kebijakan, yang akan mempengaruhi kemauannya untuk melaksanakan kebijakan, kognisi yaitu pemahamannya terhadap kebijakan, dan intensitas disposisi implementor, yakni preferensi nilai yang dimiliki oleh implementor.

Berkaitan dengan penelitian ini maka respon pelaksana dalam hal ini DPC PDI Perjuangan Kota Depok dalam penggunaan bantuan dana partai politik sangat dibutuhkan. Ini dimakutkan bahwa dana bantuan yang digunakan, dapat difokuskan pada hal-hal yang penting dalam pengelolaan partai salah satunya berkaitan dengan pendidikan politik. Selanjutnya, pemahaman pelaksana dalam hal ini ketua dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok sangat diperlukan, sehingga harapannya bahwa implementasi kebijakan bantuan dana partai politik dapat berjalan dengan baik Hasil penelitian di lapangan menunjukkan bahwa DPC PDI Perjuangan Kota Depok taat dalam penggunaan bantuan dana partai politik. Dari segi disposisi pelaksana penggunaan bantuan dilakukan dengan baik dan taat yakni berangkat dari PDC kemudian disalurkan ke PAC, Ranting sampai dengan anak ranting atas persetujuan Ketua DPC. Hal tersebut seperti yang diungkapkan oleh Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok bahwa:

“Kalau masalah anggaran kami sangat hati-hati kalau sewaktu-waktu mau dikeluarkan untuk pembiayaan kegiatan baik di tingkat DPC maupun untuk kebutuhan rekan-rekan yang ada di PAC atau ranting dan anak ranting di bawahnya. Kami percayakan urusan keuangan untuk bendahara, dengan berkoordinasi kepada saya selaku ketua DPC. Sehingga seluruh anggaran yang masuk maupun keluar harus atas sepengetahuan atau ijin dari saya. Jadi hanya satu pintu, dan ini juga mengantisipasi terjadinya hal-hal yang kita inginkan apa lagi berkaitan dengan keuangan ini kana agak sensitif.”

Proses disposisi penggunaan anggaran bantuan dana partai politik ini dilakukan dengan baik sebagai bagian dari amanat kebijakan yang berlaku dan untuk kepentingan laporan pertanggung jawaban. Dengan begitu maka bantuan dana partai politik yang diterima setiap tahunnya oleh DPC

dapat digunakan dengan sebaik-baiknya dalam rangka pelaksanaan dan peningkatan pendidikan politik dan penguatan ideologi PDI Perjuangan khususnya di Kota Depok.

Proses keluar masuk uang baik dari pemerintah maupun untuk kegiatan partai dengan harus sepengetahuan Ketua DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini juga sejalan dengan pernyataan dari Bendahara DPC bahwa; “Setiap keuangan masuk apalagi yang berasal dari pemerintah baik pusat maupun daerah harus atas sepengetahuan Ketua DPC. Begitu juga dengan uang keluar meskipun untuk kebutuhan penyelenggaraan organisasi, sehingga kami berusaha sebisa mungkin agar professional dan tidak melangkahi kewenangan ketua. Untuk pendidikan politik ya jelas, anggaran yang kami dapat salah satunya diperuntukan untuk itu sehingga menurut saya tidak ada problem terkait dengan pendidikan politik.”

Proses disposisi anggaran yang baik sebagaimana ditunjukkan oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini merupakan bagian dari profesionalisme yang harus dijunjung oleh seluruh partai politik dalam penggunaan bantuan dana yang diterima. Dengan begitu maka bantuan yang bersumber pada khas negara dan kebijakan yang menjembatannya dapat berjalan efektif dan tepat sasaran. Proses disposisi anggaran yang baik dari DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini juga berdampak pada kepercayaan lebih para kader terhadap pimpinan dan pengurus. Hal tersebut seperti yang disampaikan oleh Armi Mulyanto bahwa; “Untuk penggunaan bantuan keuangan parpol yang diterima setiap tahun oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok saya rasa pengurus yang lebih tau. Yang jelasnya bagi saya anggaran tersebut sebisa mungkin digunakan untuk keperluan partai yang bersifat urgen.”

Kepercayaan dari para kader terhadap pimpinan dan pengurus organisasi menjadi modal awal dalam penyelenggaraan. Dengan begitu maka, dapat dipastikan bahwa implementasi kebijakan bantuan dana partai politik oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok dapat berjalan dengan baik karena selain ditunjang dengan faktor ekonomi dan politik yang mumpuni, juga dengan keterlibatan atau partisipasi aktif para kader. Rasa percaya yang disematkan oleh kader terhadap pimpinan dan pengurus DPC PDI Perjuangan Kota Depok ini juga dikemukakan oleh Rahma Charlian selaku kader bahwa “Itu sebenarnya yang lebih paham ya pengurus inti dari DPC, PAC, maupun ranting atau anak ranting, karena alokasi anggarannya di sana. Tapi sejauh ini saya rasa semua berjalan dengan baik sehingga pendidikan politik berjalan dan PDI perjuangan masih dipercaya sama masyarakat Kota Depok.”

Kepercayaan yang telah terbangun oleh DPC terhadap kader maupun sebaliknya akan sangat penting dalam mendukung terealisasinya peningkatan pendidikan politik melalui bantuan dana yang diterima setia tahunnya. Dikarenakan pada dasarnya, sasaran dari pendidikan politik tersebut adalah para kader, sehingga jika ada rasa saling percaya maka akan sangat muda DPC mengkoordinir para kader PDI Perjuanga se Kota Depok salah satunya untuk kegiatan pendidikan politik.

Berdasarkan uraian tersebut di atas maka secara keseluruhan dapat dikatakan bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik dalam rangka meningkatkan pendidikan politik oleh PDI Perjuangan Kota Depok sudah memenuhi variabel keempat dalam teori Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yakni Disposisi pelaksana.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan di atas, maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan penggunaan bantuan dana partai politik oleh Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Depok sudah tepat sasaran yakni untuk pendidikan politik. Hal ini didasarkan pada beberapa hal yang antara lain meliputi:

1. Belum memenuhi variabel pertama yakni standar dan tujuan. Hal tersebut didasarkan pada penggunaan anggaran bantuan partai politik tidak diprioritaskan untuk pendidikan politik melainkan untuk operasional kegiatan partai baik ditingkat DPC, PAC, ranting sampai anak ranting.
2. Memenuhi unsur sumber daya penunjang. Hal ini didasarkan pada ketersediaan SDM yang mumpuni baik secara jumlah maupun kapasitas serta sumber daya penunjang lainnya yang dimiliki oleh DPC PDI Perjuangan Kota Depok.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)

redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



3. Sudah memenuhi unsur ketiga yakni komunikasi dan aktivitas penguatan antar-organisasi. Hal tersebut didasarkan pada proses komunikasi yang sudah terjalin dengan baik di internal PDI Perjuangan Kota Depok termasuk dalam hal pendidikan politik.
4. Memenuhi unsur keempat yakni karakteristik jawatan pelaksana. Hal ini dikarenakan DPC PDI Perjuangan dalam penyelenggaraannya berpegang teguh pada norma yang berlaku serta pola yang digunakan cenderung berpihak pada kepentingan masyarakat Kota Depok secara umum.
5. DPC PDI Perjuangan Kota Depok guna meningkatkan pendidikan politik sudah memenuhi variabel dukungan ekonomi, politik, dan sosial. Hal ini dapat dilihat dari penguasaan PDI terhadap perolehan kursi di DPRD Kota Depok.
6. Sudah memenuhi variabel keenam dalam teori Model implementasi kebijakan yang dikemukakan oleh Van Meter dan Van Horn yakni Disposisi pelaksana, yang mana ditunjukkan dengan proses disposisi keuangan bantuan dana yang diterima yang dilakukan secara adil, transparan dan akuntabel.

REFERENSI

- Abeje, A. (2013). Party System Institutionalization and the Prospect of Democratic Consolidation in Ethiopia. *European Scientific Journal August*, 9(23), 1857–7881.
- Ansyari, I., Harsasto, P., & Fitriyah. (2019). Article Analisis Patron Klien Terhadap Kemenangan Partai Golkar Kabupaten Tanah Datar Sejak Reformasi Irvan Ansyari* Priyatno Harsasto. *Indonesian Journal of Religion and Society*, 01(01), 12–23. www.journal.lasigo.org/index.php/IJRS
- Aulia, D. (2016). Penguatan Demokrasi: Partai Politik dan (Sistem) Pemilu Sebagai Pilar Demokrasi. *Jurnal Masyarakat Indonesia*, 42(1), 115–126.
- Basri, H. (2021). Strategi Komunikasi Politik Dpd Partai Golkar Pada Pemilu Legislatif Aceh Tengah 2019. *Interaksi: Jurnal Ilmu Komunikasi*, 10(1), 22–32. <https://doi.org/10.14710/interaksi.10.1.22-32>
- Bolleyer, N., & Ruth, S. P. (2018). Elite investments in party institutionalization in new democracies: A two-dimensional approach. *Journal of Politics*, 80(1), 288–302. <https://doi.org/10.1086/694394>
- Creswell, J. W., & Creswell, J. D. (2018). Mixed Methods Procedures. In *Research Defign: Qualitative, Quantitative, and Mixed Methods Approaches*.
- Djamba, Y. K., & Neuman, W. L. (2002). Social Research Methods: Qualitative and Quantitative Approaches. In *Teaching Sociology* (Vol. 30, Issue 3). <https://doi.org/10.2307/3211488>
- Erlina, F. (2023). Dinamika Sistem Pemilu dan Demokratisasi Partai Politik di Indonesia Pasca Reformasi. *Kosmik Hukum*, 23(2), 200. <https://doi.org/10.30595/kosmikhukum.v23i3.16640>
- Imelda, C., & Novianti, Liza. (2023). Implementasi Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik (Analisis Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 Tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik). *Jurnal Thengkyang*, 8(1), 12–19.
- King, G., Keohane, R. O., & Verba, S. (1995). The Importance of Research Design in Political Science. *American Political Science Review*, 89(2), 475–481. <https://doi.org/10.2307/2082445>
- Malindir, G. O., Kartini, D. S., & Mulyawan, R. (2022). *The Effectiveness of Salaman Application-Based Service Innovations for Homeless Beggars in Bandung City*. 4(3), 463–476. <https://doi.org/10.15575/ks.v4i3.17482>
- Malindir, G. O., & Rahman, Z. (2023). Evaluation of Halal Tourism Development Strategy in West Nusa Tenggara Province (Study At Tourism Department). *Jurnal Ilmiah Wahana Bhakti Praja*, 13(1), 42–53. <https://doi.org/10.33701/jiwbp.v13i1.3126>
- Malindir, G. O., & Septiansyah, B. (2024). Dynamics Of The Recruitment Process For Women Legislative Candidates (A Study Of The Nasdem Party In The 2024 Legislative Elections). *Sociae Politics*, 25(1), 21-33. <http://ejournal.uki.ac.id/index.php/sp/article/view/5860/3001>
- Muchtar, K. (2013). Komunikasi Politik Partai Golkar Dalam Proses Sosialisasi Dan Implementasi Paradigma Baru Masa Kepemimpinan Aburizal Bakrie 2009 - 2013. *Jurnal Penelitian Komunikasi*,

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com//admin@lkispol.or.id

Indexed:



16(2), 101–118. <https://doi.org/10.20422/jpk.v16i2.34>

- Nasir, N. (2016). Electoral Volatility Dalam Perspektif Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia : Sebuah Analisis Hubungan Partai Politik Dengan Konstituen. *Jurnal Politik Profetik*, 04(1), 38–65.
- Nurimansyah, M., & Ariyani, R. M. (2020). Implementasi Good Governance dalam Pengelolaan Keuangan Partai Politik menuju Democracy Maturity. *Jurnal Economic Resource*, 2(2), 114–127. <https://doi.org/10.33096/jer.v2i2.392>
- Pinilih, S. A. G. (2017). Mendorong Transparansi Dan Akuntabilitas Pengaturan Keuangan Partai Politik. *Mimbar Hukum - Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada*, 29(1), 69. <https://doi.org/10.22146/jmh.17647>
- Satidporn, W., & Thananithichot, S. (2023). Political Party Institutionalization From a Comparative Perspective: the Case of Thailand. *Journal of Liberty and International Affairs*, 9(3), 313–327. <https://doi.org/10.47305/JLIA2393320s>
- Sinaga, R., Hasibuan, F., Sinaga, A., Gea, F., & Zega, M. (2018). Demokratisasi Kelembagaan Partai Politik Di Indonesia Melalui Manajemen Partai Politik Modern: Tinjauan Teoritis Dan Regulasi. *Governance*, 4(December), 12–17.
- Somantri, G. R. (2005). Memahami Metode Kualitatif. *Makara Human Behavior Studies in Asia*, 9(2), 57. <https://doi.org/10.7454/mssh.v9i2.122>
- Sukma, S. Monawati. (2021). Problematik Kenaikan Bantuan Keuangan Yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). *Jurnal Dharmasisya*, 1(3), 1463-1472.
- Tangkere, G. M., Liando, D. M., & Lengkong, J. P. (2021). Efektifitas Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik dalam Pelaksanaan Program Pendidikan Politik. *Jurnal Transdisiplin Pertanian*, 17(3), 995–1006.
- Walidin, W., Saifullah, & Tabrani. (2015). Metodologi penelitian kualitatif & grounded theory. FTK Ar-Raniry Press.
- Wijana, I. D. P., & Rohmadi, M. (2010). Sosiolinguistik: Kajian Teori dan Analisis. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

Penerbit:

LKISPOL (Lembaga Kajian Ilmu Sosial dan Politik)
redaksigovernance@gmail.com // admin@lkispol.or.id